

APAKAH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENDETEKSI MANAJEMEN LABA?

Tertiarto Wahyudi

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Abstract

This paper evaluates the possibility of using deferred tax expense as an indicator to detect earnings management. If we assume GAAP allow greater discretion than taxation rules, and if we assume managers exploit such discretion to manage income upward such a way that does not affect taxable income, then the earnings management will generate accounting-tax differences that increase deferred tax expense.

Using data from the listed companies in the Jakarta Stock Exchange in fiscal year of 2008, the result provides evidence that deferred tax expense is incrementally useful in detecting earnings management in the form of scaled earnings changes. In addition, total accruals and absolute abnormal accruals are also predictors for earnings management.

Keywords: earnings management, deferred tax expense, abnormal accruals

PENDAHULUAN

Riset-riset sebelumnya mengungkap berbagai ukuran akrual sebagai indikasi manajemen laba sebagai tanda diskresi manajerial. Namun, berbagai ukuran tersebut tidak cukup teliti dalam mengukur besaran akrual abnormal (Guay et al., 1996). Pendekatan pengukuran akrual abnormal yang paling banyak digunakan adalah pendekatan yang diperkenalkan oleh Jones (1991) dengan turunan berikutnya yang dimodifikasi (Dechow et al., 2010) Pendekatan ini mengandung masalah karena adanya misklasifikasi sistematis dengan menganggap akrual normal sebagai akrual abnormal (Bernard dan Skinner, 1996).

Mengingat permasalahan dalam pemodelan akrual abnormal, riset ini menggunakan sarana lain untuk membuktikan adanya manajemen laba yaitu menggunakan beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan adalah komponen dari beban pajak penghasilan perusahaan keseluruhan

yang mencerminkan pengaruh pajak perbedaan temporer antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Beban pajak tangguhan muncul akibat akrual item pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang mempengaruhi laba akuntansi dan penghasilan kena pajak di periode berbeda.

Beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) diduga dapat digunakan untuk mengukur pilihan diskresioner manajer karena pilihan akuntansi berdasarkan peraturan perpajakan lebih terbatas dibandingkan dengan berdasar PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Manajer, dengan demikian, menggunakan pelaporan pajak untuk meningkatkan diskresinya sehingga penghasilan mencapai batas tertentu. Manajer juga diasumsikan cenderung melaporkan laba akuntansi lebih tinggi namun tidak melaporkan pajak yang lebih tinggi. Penggunaan diskresi untuk menaikkan laba akan menghasilkan perbedaan temporer, sehingga beban pajak

tanggungan akan mencerminkan adanya diskresi tersebut.

Perusahaan dapat melaporkan penghasilan lebih tinggi tanpa melaporkan beda temporer misalnya manajer dapat mengatur laba dengan melakukan transaksi yang menciptakan perbedaan permanen. Manajer juga dapat membuat keputusan yang merubah arus kas operasi yang berpengaruh terhadap laba dan arus kas secara bersamaan. Pilihan terakhir ini akan meningkatkan pajak terhutang sehingga analisis terhadap pajak terhutang tidak akan mengungkapkan adanya manajemen laba. Berdasarkan pertimbangan ini, maka beban pajak tanggungan kemungkinan dapat menjadi alternatif sarana mendeteksi manajemen laba menggantikan berbagai estimasi akrual yang sebelumnya telah

LANDASAN TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Masalah Konseptual dalam Akuntansi Pajak Penghasilan

Alokasi pajak penghasilan perusahaan merupakan salah satu masalah yang paling kontroversial dalam teori akuntansi keuangan. Kontroversi pertama muncul dalam ARB 43 yang menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah beban yang harus dialokasikan, bila perlu dan praktis, terhadap laba dan akun yang lain sebagaimana pengalokasian beban lain-lain. Masalah yang dihadapi adalah adanya perbedaan waktu kemunculan suatu pendapatan atau beban dalam laporan keuangan dan laporan pajak. Masalah ini juga dapat dilihat dari sudut pandang posisi keuangan di mana basis pajak dan akuntansi atas aset dan liabilitas akan berbeda. Sehingga, proses alokasi pajak penghasilan bekerja seperti suatu penyeimbang antara beban pajak penghasilan dan besarnya kewajiban pajak sedangkan

digunakan. Pertanyaan yang ingin dijawab apakah beban pajak tanggungan dapat menjelaskan manajemen laba khususnya yang terkait dengan usaha menghindari penurunan laba.

Riset ini menggunakan regresi probit kategori perusahaan yang dianggap melakukan manajemen laba sesuai Burgstahler dan Dichev (1997) terhadap variabel beban pajak tanggungan dan variabel kendali lainnya. Analisis terhadap data keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengungkapkan bahwa beban pajak tanggungan memiliki manfaat inkremental untuk mendeteksi adanya manajemen laba. Hasil lain yang diperoleh adalah akrual abnormal absolut dan akrual total juga dapat menjadi sarana untuk mendeteksi manajemen laba.

selisihnya muncul pada akun posisi keuangan melalui proses alokasi pajak. Opini APB No. 11 memberikan pendapat yang sama yaitu sepanjang perbedaan waktu masih terjadi, maka harus terdapat alokasi pajak. Analisis ini dikenal sebagai pendekatan alokasi komprehensif.

SFAS 96 yang diterbitkan tahun 1987 tetap menggunakan pendekatan alokasi komprehensif sebagaimana dalam opini APB No. 11, namun memperhatikan aspek konservatisme dalam hal pengakuan aset pajak tanggungan (*deferred tax assets*) pada neraca (Wolk, 2008, 486). SASB 109 menggantikan SFAS 96 yang pada intinya merubah orientasi pendapatan-beban (*revenue expense*) yang didasarkan pada konsep penandingan (*matching*) pada SFAS 96 menjadi pendekatan aset-liabilitas (*asset-liability*).

ARB 43 secara jelas menyatakan bahwa alokasi pajak didasarkan pada konsep penandingan. Namun,

penandingan dalam akuntansi pajak berbeda dengan penandingan dalam aplikasi lainnya yaitu mempertemukan antara beban dengan pendapatan (*revenue*). Penandingan pada pajak penghasilan, di lain pihak, berusaha untuk menormalkan beban pajak penghasilan dengan laba akuntansi sebelum pajak. Sehingga, laba setelah pajak juga berkorelasi dengan laba sebelum pajak. Proses penandingan ini menyebabkan alokasi pajak harus digambarkan pada bagian bawah dari laporan laba rugi.

Alokasi pajak penghasilan dapat meratakan laba, namun karena penerapannya bersifat wajib saat muncul beda waktu, maka pendekatan ini tidak dapat dianggap sarana untuk meratakan laba. Di lain pihak, penggunaan alokasi pajak penghasilan sebagai sarana perataan laba dimungkinkan dengan mengatur pengakuan pendapatan dan beban.

Perbedaan Laba Akuntansi dan Pajak, Akrua, dan Diskresi Manajemen

Manajemen laba dilakukan melalui diskresi manajemen terhadap pilihan-pilihan akuntansi dan arus kas. Diskresi terhadap akrua umumnya lebih sulit diamati dibandingkan dengan diskresi terhadap metoda akuntansi dan implementasinya tidak terlalu sulit dibandingkan dengan perubahan terhadap arus kas (Phillips et al., 2003). Diskresi terhadap akrua oleh para periset dijadikan sarana untuk mengidentifikasi adanya manajemen laba. Penggunaan diskresi akrua sebagai sarana manipulasi laba misalnya diungkapkan oleh Healy (1985) yang menggunakan akrua total sebagai proksi diskresi terhadap akrua. Proksi akrua total mengandung kelemahan karena mengaburkan perbedaan perbedaan akrua akibat diskresi

manajemen dan akrua yang diakibatkan oleh perubahan substansi ekonomi aktivitas perusahaan.

Jones (1991) memperkenalkan pendekatan baru identifikasi akrua diskresioner dengan mengestimasi regresi akrua total terhadap faktor yang merefleksikan perubahan dalam suatu lingkungan ekonomi perusahaan. Residu dari persamaan regresi mencerminkan adanya akrua yang tidak normal akibat diskresi manajemen. Dechow et al. (1995) memodifikasi model Jones agar mampu menampung peluang bahwa manajer menggunakan diskresi untuk mempercepat atau memperlambat pengakuan pendapatan (*revenue*) saat muncul pertanyaan apakah kriteria pengakuan telah terpenuhi.

Dechow et al. (1995) mengukur kemampuan model-model akrua untuk mendeteksi manajemen laba dan menemukan bahwa model Jones modifikasi merupakan model yang paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba dalam sekelompok sampel perusahaan yang diidentifikasi oleh SEC melakukan manipulasi laba. Guay et al. (1996) menyarankan bahwa hanya model Jones dan model Jones modifikasi yang memberikan akrua abnormal yang membedakan dekomposisi acak laba sehingga konsisten dengan akrua abnormal yang timbul dari keputusan manajemen untuk meningkatkan atau menurunkan laba. Bernard dan Skinner (1996) menyatakan bahwa model akrua abnormal Jones secara sistematis salah mengidentifikasi akrua normal sebagai abnormal. Informasi di atas menunjukkan bahwa variabel akrua merupakan ukuran diskresi manajemen yang kurang baik untuk mengatur laba.

Perbedaan waktu pengakuan laba antara akuntansi dan pajak menjadi metoda alternatif untuk

mengidentifikasi pengaruh diskresioner maupun nondiskresioner manajemen terhadap laba. Plesko (2002) menyatakan bahwa perbedaan waktu muncul akibat dari metoda pelaporan akuntansi dan perpajakan juga disebabkan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) memungkinkan diskresi manajemen yang lebih tinggi dalam menentukan besaran pendapatan dan beban dibandingkan dengan peraturan perpajakan. Sebagai ilustrasi, PABU memberikan fleksibilitas dalam menaksir cadangan piutang tak tertagih, sementara peraturan perpajakan memperbolehkan pengurangan untuk piutang yang benar-benar dihapuskan. Dalam hal aset tetap, manajer memiliki diskresi lebih tinggi dalam menentukan umur manfaat untuk aset terdepresiasi dibandingkan dengan aturan periode pemulihan biaya untuk tujuan perpajakan. PABU juga memberikan diskresi bagi manajemen dalam hal pengakuan pendapatan. Diskresi juga muncul dalam hal saat pengakuan pendapatan yang seharusnya belum diakui (*unearned*) untuk tujuan akuntansi, di mana berdasarkan peraturan perpajakan perusahaan pada umumnya harus mengakui uang muka sebagai pendapatan saat kas diterima. Akrua yang mensyaratkan adanya estimasi seperti manfaat pensiun, restrukturisasi, jaminan, dan cadangan asuransi sendiri (*self-insurance*) menciptakan perbedaan temporer antara akuntansi dan perpajakan. Sebaliknya, akrua seperti piutang dagang, kewajiban gaji, dan hutang gaji, dianggap memberikan diskresi yang lebih rendah dan umumnya tidak memberikan perbedaan antara akuntansi dan perpajakan.

Selain PABU memberikan diskresi lebih besar bagi perusahaan dibandingkan dengan aturan perpajakan, pembaca laporan keuangan juga

berasumsi bahwa manajer yang berusaha melaporkan laba lebih tinggi melakukan hal tersebut tanpa meningkatkan biaya pajak. Asumsi ini sejalan dengan asumsi bahwa lebih murah bagi manajer untuk mengatur laba melalui akrua dibandingkan dengan mengatur arus kas berlaku bagi perusahaan dengan tingkat pajak penghasilan marginal positif kecil dan perusahaan dengan tingkat pajak penghasilan marginal nol. Perusahaan-perusahaan pada kelompok pertama memiliki insentif pajak tahun berjalan untuk meningkatkan laba akuntansi dengan cara yang tidak meningkatkan beban pajak tahun berjalan. Sementara, kelompok perusahaan kedua yang memiliki kerugian periode sebelumnya juga akan berusaha menurunkan nilai sekarang (*present value*) pajak penghasilan mereka tahun berjalan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa beda pembukuan dan perpajakan yang muncul dari akrua yang tidak meningkatkan laba kena pajak akan mampu memisahkan laba akibat diskresi dan nondiskresi manajer. Riset sebelumnya telah mengaitkan perbedaan akuntansi dan pajak dengan aktivitas manajemen. Mills dan Newberry (2001) memberikan bukti bahwa perusahaan-perusahaan dengan insentif pengaturan laba memiliki perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak lebih tinggi. Secara khusus, perusahaan publik, perusahaan dengan tingkat pinjaman yang lebih tinggi, dan perusahaan privat yang mengalami kesulitan keuangan memiliki perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang lebih tinggi. Keduanya melaporkan bahwa bahwa perusahaan dengan perubahan laba positif yang kecil memiliki perbedaan laba akuntansi dan laba kena pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan

dengan perubahan laba negatif yang kecil. Riset oleh Mills dan Newberry (2001) menggunakan data dari surat pemberitahuan tahunan (*tax return*) yang bersifat rahasia. Berbeda dengan riset oleh Mills dan Newberry (2001), riset ini menggunakan data publik berupa beban pajak tangguhan sebagai wakil empiris untuk perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak.

Di Indonesia, beban pajak tangguhan sebagai proksi perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak dihitung berdasarkan PSAK 46. Standar akuntansi keuangan ini didasarkan pada IAS 12. PSAK 46 yang pertama kali dikeluarkan tahun 1997 telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya PSAK 46 revisi 2010.

Penerapan pertama kali pada laporan keuangan 1999 untuk perusahaan publik dan laporan keuangan 2001 untuk perusahaan non publik. PSAK 46 mendefinisikan perbedaan temporer sebagai perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat mengurangi pajak. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Perbedaan temporer yang dapat mengurangi pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

Beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) dihitung sesuai dengan PSAK 46 yang mengacu pada

IAS 12 yang menggunakan pendekatan neraca. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perbedaan waktu adalah perbedaan nilai aset dan liabilitas akibat perbedaan basis akuntansi dan perpajakan yang diharapkan akan terpulihkan di masa depan. Perbedaan waktu dapat menghasilkan liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan. Kenaikan dalam liabilitas pajak tangguhan adalah konsisten dengan situasi di mana perusahaan mengakui pendapatan dan/atau menunda beban untuk tujuan akuntansi dibandingkan dengan tujuan perpajakan sehingga menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan. Sebaliknya, aset pajak tangguhan meningkat akibat perusahaan saat ini mengakui beban dan/atau menunda pengakuan pendapatan sehingga menciptakan nilai yang dapat mengurangi laba di masa depan. Bila kondisi lain tidak berubah, perusahaan akan melaporkan laba akuntansi sebelum pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba kena pajak saat terjadi kenaikan liabilitas pajak tangguhan.

Batas Laba

Manajer memiliki berbagai insentif untuk tidak melaporkan penurunan laba dan kerugian (Burgstahler dan Dichev, 1997). Kedua periset ini memberi bukti pengaturan laba dengan memperlihatkan frekuensi perusahaan yang memiliki kenaikan laba nol atau negatif kecil (*small negative*) adalah lebih tinggi dari yang diharapkan dalam suatu distribusi lintas seksi perubahan laba. Hasil yang serupa juga terdapat pada tingkat laba nol dan positif kecil (*small positive*).

Perusahaan yang melaporkan laba nol atau positif/negatif kecil dianggap melakukan pengaturan laba. Bila riset sebelumnya menggunakan ukuran akrual sebagai proksi manajemen laba, maka riset ini

menggunakan beban pajak tangguhan yang mencerminkan adanya diskresi manajemen untuk mendeteksi adanya manajemen laba. Dengan demikian hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

METODE PENELITIAN

Sampel

Sampel yang digunakan dalam riset ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi tidak dimasukkan dalam sampel karena merupakan perusahaan yang pengelolaan keuangannya diregulasi. Data keuangan yang digunakan adalah data tahun 2008. Pada periode ini terdapat 389 perusahaan yang melakukan listing di BEI sedangkan 67 di antaranya dikategorikan lembaga keuangan (BEI Fact Book 2008). Data keuangan perusahaan tercantum dalam basisdata OSIRIS. Ikhtisar dari sampel adalah sebagai berikut: Jumlah perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEI 389; Perusahaan Bank dan Lembaga Keuangan 67; Perusahaan dengan data tidak tersedia 18, sehingga Jumlah sampel adalah 304 perusahaan.

Data yang digunakan adalah data keuangan lintas seksi (*cross-section*) tahun 2008.

Model Empiris

Analisis empiris utama menilai kemampuan beban pajak tangguhan dan ukuran akrual lainnya untuk mendeteksi manajemen laba. Ada situasi di mana manajemen laba akan muncul yaitu tingkat perubahan laba nol atau positif rendah (*slightly positive*). Untuk mengungkapkan manajemen laba di mana manajemen menghindari penurunan laba maka dilakukan

H: Beban pajak tangguhan berguna sebagai ukuran akrual dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

estimasi model regresi probit sebagai berikut:

$$EM_{it} = \alpha + \beta_1 DTE_{it} + \beta_2 AA_{it} + \beta_3 DCFO_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

EM_{it} = variabel kategori 1 bila perubahan pada laba bersih perusahaan i tahun $t-1$ ke t dibagi dengan nilai pasar ekuitas pada awal tahun ≥ 0 dan $< 0,01$, dan 0 bila perubahan laba bersih $\geq -0,01$ dan < 0 (Burgstahler dan Dichev, 1997).

DTE_{it} = beban pajak tangguhan tahun t dibagi aset total akhir tahun $t-1$.¹

AA_{it} = akrual abnormal absolut yang dihitung menggunakan model Jones modifikasian tahun t .

$DCFO_{it}$ = perubahan dari arus kas dari operasi dari tahun $t-1$ ke t dibagi dengan aset total pada akhir tahun $t-1$.

EM_{it} akan sama dengan 1 bila perusahaan melaporkan perubahan laba yang diskala pada tahun t melebihi atau sama dengan nol dan kurang dari 0,01 dan sebaliknya. Koefisien DTE_{it} pada persamaan (1) yang bernilai positif dan signifikan menunjukkan bahwa peluang manajemen laba untuk melaporkan penurunan laba meningkat dengan meningkatnya beban pajak tangguhan.

AC merupakan variabel akrual yang digunakan untuk mendeteksi manajemen laba. Bila koefisien variabel ini positif berarti manajemen

¹ Berdasarkan PSAK 46 beban pajak perusahaan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Karena pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, maka angka ini bersifat mandatori. Diskresioner akan muncul pada beban pajak tangguhan, sehingga dalam riset ini item yang diambil sebagai proksi adalah beban pajak pada basisdata OSIRIS.

menggunakan akrual untuk menghindari penurunan laba. Dengan memasukkan DTE_{it} dan AA_{it} dalam model memungkinkan pengidentifikasian kemanfaatan masing-masing ukuran secara inkremental untuk mendeteksi

manajemen laba. Penggunaan CFO_{it} dalam modal adalah untuk mengendalikan pengaruh perubahan arus kas operasi terhadap kemungkinan melakukan manajemen laba.

Model Akrual

Dua model akrual digunakan dalam riset ini masing-masing model akrual total (Healy, 1985) dan model

Jones modifikasian (Dechow, et al. 1995). Akrual total ditentukan dengan mengurangi laba operasi dikurang arus kas operasi sebagai berikut:

$$AkT_{it} = LO_{it} - AKO_{it} \quad (2)$$

AkT_{it} = akrual total perusahaan tahun t

LO_{it} = laba dari aktivitas operasi perusahaan tahun t

AKO_{it} = arus kas dari aktivitas operasi perusahaan tahun t

Selanjutnya, dilakukan estimasi lintas seksi untuk mencapai akrual abnormal melalui model Jones modifikasian (Dechow et al., 1995) sebagai berikut:

$$\frac{AkT_{i,t}}{Aset_{i,t-1}} = \beta_1 \frac{1}{Aset_{i,t-1}} + \beta_2 \frac{\Delta Rev_{i,t}}{Aset_{i,t-1}} + \beta_3 \frac{ATetap_{i,t}}{Aset_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

$TA_{j,t}$ = total akrual; Laba Operasional-Kas dari Aktivitas operasi

$Aset_{j,t-1}$ = aset total pada awal tahun

$\Delta Rev_{j,t}$ = perubahan pendapatan, kenaikan penjualan dikurangi dengan kenaikan piutang

$ATetap$ = total aset tetap sebelum dikurangi depresiasi

Faktor perbedaan antara perubahan penjualan dan perubahan piutang digunakan untuk menangkap perubahan akibat diskresi pada penjualan kredit. Akrual diskresionari adalah selisih antara akrual total dan faktor yang tidak

terjelaskan oleh variabel-variabel tersebut (*error terms*) persamaan (2). Persamaan (2) mengindikasikan bahwa akrual diskresionari absolut yang semakin tinggi menunjukkan rendahnya kualitas laba dan sebaliknya.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 memperlihatkan statistik ringkas perbandingan antara perusahaan dengan perubahan laba nol atau positif

kecil dan perusahaan dengan perubahan laba negatif kecil, masing-masing untuk yang terindikasi melakukan pengaturan laba dan tidak melakukan pengaturan laba.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

<u>EM=1</u>	<u>n</u>	<u>Mean</u>	<u>Deviasi Std.</u>	<u>Maksimum</u>	<u>Minimum</u>
DTE	164	0,071920	0,182114	0,799501	-0,804963
AA	164	0,145820	0,198735	1,312482	0,001263
TA	164	0,163752	0,625017	7,751965	0,000000
DCFO	164	0,016720	0,187835	0,481358	-1,416960
<u>EM=0</u>					
DTE	140	0,019710	0,090442	0,512923	-0,356138
AA	140	0,071248	0,088127	0,656929	0,000518
TA	140	0,076126	0,125884	1,358557	0,000000
DCFO	140	-0,026333	0,313266	1,483569	-2,509700

DTE = beban pajak tangguhan; AA = akrual abnormal absolut; TA=log akrual total yang merupakan selisih antara laba operasi dikurang dengan arus kas operasi; DCFO = perubahan arus kas operasi.

Dari tabel ini terlihat bahwa mean beban pajak tangguhan (DTE) untuk perusahaan yang terklasifikasi melakukan manajemen laba (EM=1) lebih tinggi dibandingkan dengan beban pajak tangguhan perusahaan yang tidak melakukan manajemen laba (EM=0). Hal yang sama juga berlaku bagi akrual

abnormal. Perusahaan-perusahaan yang terklasifikasi sebagai melakukan manajemen laba (EM=1) memiliki akrual abnormal (AA) lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terklasifikasi melakukan manajemen laba (EM=0).

Hasil Regresi

Hasil estimasi terhadap persamaan (1) memberikan bukti mengenai kemanfaatan inkremental beban pajak tangguhan dengan akrual abnormal absolut dan akrual total absolut untuk

mendeteksi adanya penghindaran terhadap penurunan laba. Tabel 2 memperlihatkan hasil estimasi model probit untuk beban pajak tangguhan dan akrual total absolut sebagai variabel uji.

Tabel 2
Hasil Regresi Probit untuk Perubahan Laba

n=304	Koefisien	z-Statistik	p-value
Intersep	-0,307456	-2.949650	0.0032
DTE	1,711189	2.923544	0.0035
AA	3,403781	4.413875	0.0000
DCFO	1,052587	3.055559	0.0022

Lihat Tabel 1 untuk penjelasan mengenai definisi variabel. Perubahan laba yang diskala yang menunjukkan manajemen laba untuk menghindari penurunan laba EM = 1 berarti $[(\text{laba bersih}_t - \text{laba bersih}_{t-1}) / \text{MV}_{t-1}]$ adalah 0 dan $<0,01$ dan EM=0 bila perubahan tersebut $>0,01$ dan lebih kecil 0.

Berdasarkan hasil estimasi regresi terlihat bahwa koefisien DTE bernilai positif (1,711189) dan signifikan (0,0035). Ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan secara inkremental dapat mendeteksi adanya manajemen laba. Berkaitan dengan koefisien variabel AA, hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien ini memiliki nilai 3,403781 dan signifikan ($p < 0,0001$) yang mengindikasikan bahwa akrual abnormal absolut secara inkremental berguna untuk mendeteksi manajemen laba.

Interpretasi hasil estimasi dapat digunakan untuk menentukan peluang sebuah perusahaan melakukan manajemen laba. Misalkan, sebuah perusahaan memiliki beban pajak tangguhan, akrual abnormal absolut, dan perbedaan arus kas operasi masing-masing 0,044624, 0,089077, dan 0,068656. Angka probit dari perusahaan ini melalui persamaan di atas adalah 0,146728 dibulatkan menjadi 0,15. Melalui tabel Z diketahui angka ini bernilai 0,5596. Ini berarti peluang melakukan manajemen laba adalah sebesar sekitar 44 persen.

Beban Pajak Tangguhan dan Akrual Total

Persamaan regresi (1) dimodifikasi dengan mengganti variabel

akrual abnormal absolut dengan akrual total untuk menunjukkan perbedaan kemampuan penjelas dari variabel ini.

Tabel 3
Hasil Regresi Probit untuk Perubahan Laba

n=304	Koefisien	z-Statistik	p-value
Intersep	-0.137011	-1.440349	0.1498
DTE	1.446692	2.564367	0.0103
TA	1.764412	2.840693	0.0045
DCFO	1.184467	2.787905	0.0053

Lihat Tabel 1 untuk penjelasan mengenai definisi variabel. Perubahan laba yang diskala yang menunjukkan manajemen laba untuk menghindari penurunan laba $EM = 1$ berarti $[(laba\ bersih_t - laba\ bersih_{t-1}) / MV_{t-1}]$ adalah 0 dan $< 0,01$ dan $EM = 0$ bila perubahan tersebut $> 0,01$ dan lebih kecil 0. TA adalah akrual total yaitu laba operasi dikurang arus kas operasi dibagi aset total.

Koefisien beban pajak tangguhan, akrual total, dan perubahan arus kas aktivitas operasi seluruhnya positif dan signifikan. Ini berarti bahwa baik model akrual total (Healy, 1985) maupun model akrual abnormal absolut Jones modifikasian (Dichev et al., 1995) dapat digunakan untuk memprediksi peluang terjadinya manajemen laba.

Secara keseluruhan hasil yang diperoleh adalah konsisten dengan

hipotesis yaitu beban pajak tangguhan bermanfaat secara inkremental untuk mendeteksi manajemen laba dalam bentuk penghindaran terhadap penurunan laba. Akrual abnormal absolut yang ditentukan menggunakan model Jones modifikasian (Dichev et al., 1995) lebih berguna dibandingkan dengan beban pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba. Demikian

juga, model akrual total (Healy, 1985) lebih berguna dibandingkan dengan beban pajak tangguhan untuk

SIMPULAN

Riset ini mengungkapkan kemanfaatan inkremental beban pajak tangguhan untuk mendeteksi terjadinya manajemen laba. Manajemen melakukan pengaturan laba melalui diskresi yang lebih tinggi dalam PABU dibandingkan melalui peraturan perpajakan. Manajemen akan melakukan hal ini sedemikian sehingga tidak menambah laba kena pajak (pajak terhutang). Perilaku ini akan

mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

menghasilkan beda waktu yang akan meningkatkan beban pajak tangguhan.

Hasil analisis mendukung hipotesis bahwa beban pajak tangguhan bermanfaat untuk mendeteksi manajemen laba. Beban pajak tangguhan juga terlihat lebih akurat dibandingkan dengan akrual abnormal total Jones modifikasian dalam mendeteksi manajemen laba atau membedakan perusahaan yang terindikasi melakukan manajemen laba dan yang tidak melakukan manajemen laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard, V. dan D. Skinner (1996), What motivates managers' choice of discretionary accruals? *Journal of Accounting and Economics* 22 (1-3); 313-325.
- Burgstahler, D. dan I. Dichev (1997), Earnings management to avoid earnings decreases and losses. *Journal of Accounting and Economics* 24(1); 99-126.
- Dechow, P., R. Sloan, dan A. Sweeney (1995) Detecting earnings management, *The Accounting Review* 70 (2); 193-225.
- Dechow, Patricia, Weili Ge, dan Catherine Schrand. 2010. Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. *Journal of Accounting and Economics* 50(2-3). 344-401.
- Guay, W., S. P. Kothari, dan R. Watts (1996), A market-based evaluation of discretionary accruals models, *Journal of Accounting and Economics* 34 (supplement); 83-105.
- Healy, Paul (1985), The effect of bonus schemes on accounting decisions, *Journal of Accounting and Economics* 7(1-3);85-107.
- Jones, J. (1991), Earnings management during import relief investigation, *Journal of Accounting Research* 29 (2); 193-228.
- Mills, L. dan K. Newberry (2001), The influence of tax and nontax costs on book-tax reporting differences: Public and private firms, *The Journal of the American Taxation Association* 23 (1); 1-19.
- Plesko, G. (2002), Reconciling corporations' book and taxable income, 1996-1998, *SOI Bulletin* (Spring); 111-132.
- Wolk, H. I, J. L. Dods, dan J. J. Rozycki (2008), **Accounting Theory – Conceptual Issues in a Political and Economic Environment**, Sage Publishing